



RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026



Jl. SM. Raja, Medan Amplas
www.bapendasumut.go.id



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat daerah Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini dapat memberikan arah dalam penyusunan KUA/PPAS dan menjadi pedoman kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025. Semoga dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, 10 oktober 2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**Ir. ARDAN NOOR, MM,
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660926 199303 1 010**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU.....	8
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat	32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	33
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	36
3.3 Program dan Kegiatan	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
BAB V PENUTUP	51
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Kinerja Program dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2024	8
Tabel 2. 2. T.C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Bapenda Provinsi Sumatera Utara.....	9
Tabel 2. 3. T.C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda Provinsi Sumatera Utara....	20
Tabel 2.4. T.C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Provinsi Sumatera Utara.....	27
Tabel 2.5. T.C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Sumatera Utara	32
Tabel 3.2. T.C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	39
Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	2
Gambar 1.2.	Proses penyusunan dan keterkaitan renja dengan dokumen perencanaan lainnya.....	3
Gambar 3.1.	Cascading Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Bapenda Sumut merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan, yaitu pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Renja Bapenda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 disusun untuk menjabarkan prioritas dan target kinerja serta menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

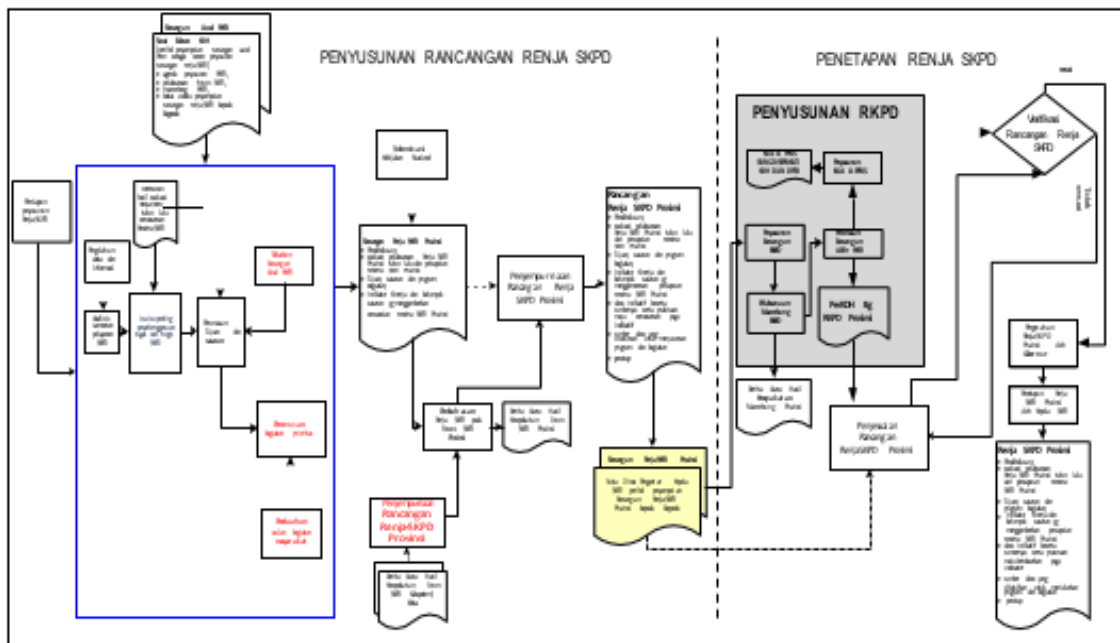
1.1.1. Proses Penyusunan Renja PD

Penyusunan Renja PD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dapat dilihat

pada bagian ketujuh tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pasal 125 s.d 135. Tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah



1.1.2. Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Lain

Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Oleh karenanya Renja Tahun 2026 ini menjadi sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara guna memenuhi kebutuhan belanja Pembangunan daerah.

Dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20 tahun, Rencana Strategis (Renstra) 5 Tahun. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dijabarkan berdasarkan Renstra OPD dan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD tahun 2025. Secara diagramatis keterkaitan hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat padagambar berikut:



Gambar 1.2.

Proses penyusunan dan keterkaitan renja dengan dokumen perencanaan lainnya

Mengacu pada gambar di atas diketahui bahwa secara rinci hubungan Renja dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut: Renja PD disusun dengan mempedomani Renstra PD dan mengacu pada RKPD. RKPD yang telah disahkan kemudian dijabarkan ke dalam KUA/PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 ini harus mensinkronkan kepada dokumen RKP dan Renja K/L.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, perlu disusun untuk menjabarkan prioritas dan target kinerja serta menjadi pedoman pelaksanaan dari setiap Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 disusun merupakan tahun ke 2 (dua) Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, sehingga dasar penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. Berkenaan dengan hal tersebut, Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 ini menjadi sangat penting karena merupakan penjabaran dari arah kebijakan Pembangunan daerah yang tercantum pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 No 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);

17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7).
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yaitu untuk memenuhi amanat Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yakni sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, yaitu:

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam tahun anggaran 2026;
2. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas terhadap alokasi sumber daya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan Asli daerah di tahun 2026 sesuai target sasaran strategis yang telah ditetapkan;
3. Mendorong dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Pendapatan daerah antar bidang khususnya dalam menggali sumber -sumber pendapatan daerah berdasarkan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya;
4. Menjadi bahan pendukung penyusunan KUA-PPAS dan Rancangan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.3.1. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi
 - 2.3.2. Formulasi isu – isu penting
- 2.4. Review terhadap RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebelum dilaksanakan evaluasi, dilakukan pengukuran kinerja kemudian dilanjutkan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Analisis atas kendala atau permasalahan yang terjadi untuk dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga tujuan dan target kegiatan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan yang ditetapkan. Faktor-faktor penyebab terpenuhi dan tidak terpenuhi target kinerja program atau kegiatan, implementasi yang timbul terhadap target capaian dan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab, merupakan penjelasan dari capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang dapat dilihat pada table 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
REKAPITULASI KINERJA PROGRAM & REALISASI KEUANGAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	PROGRAM	REALISASI KINERJA (%)	REALISASI KEUANGAN (%)
	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	94,41
2	Program Pengelolaan keuangan Daerah	100,00	100,00
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100,00	90,62
	<i>Rata Rata Capaian Kinerja</i>	100,00	94,25

Dari Tabel capaian kinerja program dan realisasi keuangan tahun 2024 di atas, maka Capaian Kinerja Program dan Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan TW IV Tahun Anggaran 2024 adalah dengan rata-rata capaian Kinerja Program sebesar 100 persen dengan predikat Sangat Tinggi dan rata-rata Realisasi Keuangan sebesar 94,25 persen dengan predikat Sangat Tinggi.

TABEL (T.C.29)

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

FORMULIR EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH																								
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA																								
PRIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024																								
NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Ranja Perangkat Daerah Tahun 2026		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2024)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
MEMINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI SEKTOR PAJAK DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah pemenuhan layanan administrasi Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	3380 Orang /Lap	1.221.868.413.123	845 Orang/lap	91.764.121.693	3380 Orang/Lap	408.228.996.191	845 Orang/lap	89.457.492.028	845 Orang/lap	87.534.660.082	845 Orang/lap	74.793.511.115	845 Orang/lap	135.701.614.024	3380 Orang/Lap	385.447.036.318	3380 orang/Lap	477.211.158.011	19,59%	39,06	BAPENDASU	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	36 laporan	4.357.296.000	12 laporan	99.358.320	12 laporan	1.523.457.800	1 Lap	99.358.320	1 Lap	468.622.956	1 Lap	593.332.100	1 Lap	656.678.550	4 Lap	1.387.725.926	15 Lap	1.487.084.246	91,09%	34,129	BAPENDASU	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dok	2.512.878.000	1 Dok	99.358.320	4 Dok	908.651.800	1 Dok	99.358.320	1 Dok	194.998.776	1 Dok	502.031.700	1 Dok	430.266.000	4 Dok	796.388.796	4 Dok	895.747.116	87,65%	35,646	BAPENDASU	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Laporan	41.340.000	4 Lap	0	4 Lap	13.780.000	0 Lap	0	0 Lap	0	1 Lap	9.747.000	1 Lap	0	4 Lap	9.747.000	5 Lap	9.747.000	70,73%	23,578	BAPENDASU	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.803.078.000	0	0	4 Lap	601.026.000	0	0	1 Lap	273.624.180	1 Lap	81.553.400	2 Lap	226.412.550	4 Lap	581.590.130	2 Lap	581.590.130	96,77%	32,255	BAPENDASU
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																			100,00%		85,05%		
Predikat Kinerja																			Tinggi		Rendah		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	2.535 Oran/Lap	674.465.390.022	845 Oran/Lap	70.497.524.136	845 Oran/Lap	224.821.796.674	845 Oran/2 Lap	70.497.524.136	845 Oran/2 Lap	49.672.232.225	845 Oran/2 Lap	36.139.855.915	845 Oran/2 Lap	66.379.410.202	3380 Oran/2 Lap	220.732.636.813	3380 Oran/Lap	291.230.160.949	98,18%	43,18	BAPENDASU
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.535 Orang	654.561.606.564	845 Org	68.548.779.356	845 Org	218.187.202.188	845 Org	68.548.779.356	845 Org	48.648.067.136	845 Org	34.305.841.240	845 Org	63.506.987.698	3380 Org	215.009.675.430	3380 Org	283.558.454.786	98,54%	43,320	BAPENDASU
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	10.319.071.608	1 Dok	427.134.890	4 Dok	3.439.690.536	1 Dok	427.134.890	1 Dok	561.580.200	1 Dok	313.516.650	1 Dok	1.379.649.127	4 Dok	2.681.880.867	4 Dok	3.109.015.757	77,97%	30,129	BAPENDASU
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	7.295.253.000	1 Dok	547.237.500	4 Dok	2.431.751.000	1 Dok	547.237.500	1 Dok	329.031.000	1 Dok	1.449.568.250	1 Dok	926.817.750	4 Dok	2.325.836.750	2 Dok	2.873.074.250	95,64%	39,383	BAPENDASU
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Dok	1.520.462.850	0 Dok	0	4 Dok	506.820.950	0 Dok	0	1 Dok	55.195.525	1 Dok	70.929.775	2 Dok	390.348.737	4 Dok	461.278.512	2 Dok	390.348.737	91,01%	25,673	BAPENDASU
	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dok	768.996.000	0 Dok	0	4 Dok	256.332.000	0 Dok	0	1 Dok	78.358.364	0 Dok	-	3 Dok	175.606.890	4 Dok	253.965.254	2 Dok	175.606.890	99,08%	22,836	BAPENDASU
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																			100%		73,56%	0%	
Predikat Kinerja																			Tinggi		Tinggi		

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	160 orang	904.120.860	128 orang		32 orang	301.373.620	0 Orang	-	5 Orang	25.294.000	10 orang	66.495.300	17 orang	63.795.300	32 orang	91.789.300	32 orang	91.789.300	30,46%	0,102	BAPENDASU
	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahgaskan	100 Orang	213.000.000	80 Orang		20 Orang	71.000.000	0 Orang	0	5 Orang	5.994.000	5 Orang	63.795.300	17 Orang	63.795.300	27 Orang	69.789.300	27 Orang	69.789.300	98,29%	32,765	BAPENDASU
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya ASN	60 orang	691.120.860	48 orang		12 orang	230.373.620	0 Orang	0	0 Orang	19.300.000	5 Orang	2.700.000	5 orang	0	10 orang	22.000.000	10 orang	22.000.000	9,55%	3,183	BAPENDASU
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																			100%	10,15	53,92%		
																			Tinggi		Tinggi		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 laporan	123.420.750	0 Lap		0 8 laporan	41.140.250	0 laporan	0	2 laporan	2.960.000	0 laporan	-	8 Lap	0	8 Lap	2.960.000	8 laporan	2.960.000	7,19%	0,024	BAPENDASU
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 laporan	123.420.750	0 Lap		0 4 laporan	41.140.250	0 laporan	0	2 laporan	2.960.000	0 laporan	-	4 Lap	0	4 Lap	2.960.000	4 laporan	2.960.000	0,15	2,398	BAPENDASU
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 laporan	132.183.750	0 Lap		0 4 laporan	41.140.250	0 laporan	0	2 laporan	2.960.000	0 laporan	-	4 Lap	0	4 Lap	2.960.000	4 laporan	2.960.000	0,15	2,239	BAPENDASU
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																			100%		14,68%		
																			Tinggi		Tinggi		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	72 Lap	208.243.673.736	1 Lap	3.000.000	24 Lap	69.414.557.912	1 Lap	-	24 Lap	22.675.476.086	12 Lap	13.434.703.110	8 Lap	23.921.874.791	24 Lap	60.032.053.987	24 Lap	60.035.053.987	86,48%	3,183	BAPENDASU
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.340.443.562	0 Lap		4 Laporan	780.147.854	0 Lap	0	2 Laporan	214.244.311	1 Laporan	138.405.952	4 Lap	376.231.101	4 Lap	728.881.364	4 Lap	728.881.364	93,43%	31,143	BAPENDASU

	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	109.920.523.572	0 Lap		4 Laporan	36.640.174.524	0 Lap	0	2 Laporan	12.773.999.791	1 Laporan	7.133.624.166	4 Lap	10.251.516.482	4 Lap	30.159.140.439	4 Lap	30.159.140.439	82,31%	27,437	BAPENDASU	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	25.238.146.854	0 Paket		4 Paket	8.412.715.618	0 Paket	0	2 Paket	2.474.096.427	1 Paket	2.267.426.953	1 Paket	3.419.359.749	4 Paket	8.160.883.129	4 Paket	8.160.883.129	97,01%	32,336	BAPENDASU	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Dokumen Bjumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan anahan Bacaan	12 Dok	55.695.927.228	0 Dok		4 Dok	18.565.309.076	0 Dok	0	2 Dok	6.050.113.487	1 Dok	3.002.482.520	1 Dok	7.440.263.773	4 Dok	16.492.859.780	4 Dok	16.492.859.780	88,84%	29,612	BAPENDASU	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	36.000.000	1 Dok	3.000.000	4 Dok	12.000.000	1 Dok	0	2 Dok	3.000.000	1 Dok	4.335.000	1 Dok	4.665.000	4 Dok	12.000.000	4 Dok	12.000.000	100,00%	33,333	BAPENDASU	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDan	12 Laporan	15.012.632.520	0 Laporan		4 Laporan	5.004.210.840	0	0	2 Laporan	1.160.022.070	1 Laporan	888.428.519	1 Laporan	2.429.838.686	4 Laporan	4.478.289.275	4 Laporan	4.478.289.275	89,49%	29,830	BAPENDASU	
																			100,00%		91,85%			
																			Predikat Kinerja		Tinggi		Tinggi	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	65 unit	78.960.984.000	6 unit	9.739.878.465	7 unit	26.320.328.000	3 unit	7.436.248.800	3 unit	0	4 unit	7.111.602.375	3 unit	11.433.670.117	7 unit	25.981.521.292	17 unit	35.721.399.757	98,71%	45,24	BAPENDASU	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	21 Unit	1.483.200.000	1 Unit	1.670.863.830	1 Unit	494.400.000	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	410.100.000	0 Unit	0	1 Unit	410.100.000	8 Unit	2.080.963.830	82,95%	140,302	BAPENDASU	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 Unit	77.477.784.000	3 Unit	8.069.014.635	6 Unit	25.825.928.000	3 Unit	7.436.248.800	3 Unit	0	3 Unit	6.701.502.375	3 Unit	11.433.670.117	6 Unit	25.571.421.292	9 Unit	33.640.435.927	99,01%	0	BAPENDASU	

																	Rata - Rata Capaian Kinerja (%)	30,76%		90,98%			
																	Predikat Kinerja	Rendah		Tinggi			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemenuhan Laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	24 laporan	188.848.895.805	2 laporan	9.549.951.571	8 laporan	62.949.631.935	2 Lap	9.549.951.571	2 Lap	10.064.763.110	2 Lap	13.404.297.655	8 Lap	23.858.558.225	8 Lap	56.877.570.561	8 Lap	66.427.522.132	90,35%	35,175	BAPENDASU
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.509.800.000	1 Lap	761.712.568	4 Laporan	8.836.600.000	1 Lap	761.712.568	1 Lap	2.197.931.685	1 Lap	1.206.249.895	4 Lap	2.784.300.822	4 Lap	6.950.194.970	4 Lap	7.711.907.538	78,65%	29,091	BAPENDASU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	162.339.095.805	1 Lap	8.788.239.003	4 Laporan	54.113.031.935	1 Lap	8.788.239.003	1 Lap	7.866.831.425	1 Lap	12.198.047.760	4 Lap	21.074.257.403	4 Lap	49.927.375.591	4 Lap	58.715.614.594	92,26%	36,168	BAPENDASU
																	Rata - Rata Capaian Kinerja (%)	100%		85,46%			
																	Predikat Kinerja	Tinggi		Tinggi			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemenuhan unit pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	378 unit	66.088.052.700	40 unit	1.874.409.201	126 unit	22.856.710.000	20 unit	1.874.409.201	20 unit	4.625.311.705	40 unit	4.043.224.660	46 unit	9.387.626.839	126 unit	20.340.778.439	126 unit	22.215.187.640	88,99%	33,61	BAPENDASU
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	105 unit	7.468.849.710	10 unit	422.612.070	35 Unit	2.489.616.570	10 Unit	422.612.070	5 Unit	300.976.480	10 Unit	373.610.980	10 Unit	1.282.703.937	35 Unit	2.379.903.467	35 Unit	2.802.515.537	95,59%	37,52	BAPENDASU
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	105 Unit	14.699.136.249	10 Unit	521.649.431	35 Unit	4.899.712.083	10 Unit	521.649.431	5 Unit	799.090.450	10 Unit	1.071.457.397	10 Unit	2.164.558.138	35 Unit	4.556.755.416	35 Unit	5.078.404.847	93,00%	34,55	BAPENDASU

	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	66 Unit	7.034.042.625	0 Unit	-	22 Unit	2.344.680.875	0 Unit	0	5 Unit	239.843.775	5 Unit	696.231.325	12 Unit	1.352.319.775	22 Unit	2.288.394.875	22 Unit	2.288.394.875	97,60%	32,533	BAPENDASU
	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	102 unit	36.886.024.116	20 Unit	930.147.700	34 Unit	12.295.341.372	10 Unit	930.147.700	4 Unit	3.285.401.000	10 Unit	1.901.924.958	10 Unit	4.588.044.989	34 Unit	10.705.518.647	34 Unit	11.635.666.347	87,07%	31,54	BAPENDASU
	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	102 unit	2.482.077.300	20 Unit	0	34 Unit	827.359.100	0 Unit	0	0 Unit	0	10 Unit	95.773.575	24 Unit	314.432.459	34 Unit	410.206.034	34 Unit	410.206.034	49,58%	16,53	BAPENDASU
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	88,99%				
Predikat Kinerja																		Tinggi	Tinggi				
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah Laporan pengelolaan keuangan daerah	12 laporan	102.288.000	0 Laporan	100 persen	34.096.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0	0	34 Laporan	-	0,00%	-	BAPENDASU	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	12 Laporan	102.288.000	0 Laporan	0	4 Laporan	34.096.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	-	BAPENDASU
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten / kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	12 Laporan	102.288.000	0 Laporan	0	4 Laporan	34.096.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	-	BAPENDASU
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																		0	0,00%				
Predikat Kinerja																		Rendah	Rendah				

		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	72 laporan	55.053.487.158	0 Lap	2.283.625.123	100 Persen	18.351.162.386	0 laporan	0	14 laporan	1.238.434.623	2 laporan	1.141.684.500	7 laporan	14.250.314.926	7 laporan	16.630.434.049	100 Persen	16.533.940.049	90,62%	30,033	
		Kegiatan pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah Laporan pengelolaan pendapatan daerah	72 laporan	55.053.487.158	0 Lap	2.283.625.123	24 laporan	18.351.162.386	0 laporan	0	14 laporan	1.238.434.623	7 laporan	1.141.684.500	7 laporan	14.250.314.926	7 laporan	16.630.434.049	24 laporan	16.533.940.049	90,62%	30,033	BAPENDASU
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	12 laporan	4.253.017.818	0 Lap	166.160.500	4 laporan	1.417.672.606	0 laporan	0	2 laporan	65.657.300	1 laporan	100.503.200	1 laporan	950.746.936	1 laporan	1.116.907.436	4 laporan	1.116.907.436	78,78%	26,262	BAPENDASU
		Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	12 laporan	2.329.319.940	0 Lap	356.008.244	4 laporan	776.439.980	0 laporan	0	2 laporan	345.380.944	1 laporan	10.627.300	1 laporan	147.271.000	1 laporan	503.279.244	4 laporan	503.279.244	64,82%	21,606	BAPENDASU
		Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 laporan	3.946.711.200	0 Lap	246.726.600	4 laporan	1.315.570.400	0 laporan	0	2 laporan	213.231.600	1 laporan	33.495.000	1 laporan	870.530.640	1 laporan	1.117.257.240	4 laporan	1.117.257.240	84,93%	28,309	BAPENDASU
		Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, Pelaporan Basis Data Pajak	12 laporan	2.044.050.000	0 Lap	147.134.113	4 laporan	681.350.000	0 laporan	0	2 laporan	85.310.013	1 laporan	61.824.100	1 laporan	405.233.658	1 laporan	552.367.771	4 laporan	552.367.771	81,07%	27,023	BAPENDASU
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	12 laporan	2.078.820.000	0 Lap	198.155.864	4 dokumen	692.940.000	0 dokumen	0	2 dokumen	179.285.864	1 dokumen	18.870.000	1 dokumen	470.720.850	1 dokumen	668.876.714	4 dokumen	668.876.714	96,53%	32,176	BAPENDASU
		Pengendalian, Pemaksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 laporan	40.401.568.200	0 Lap	1.169.439.802	4 laporan	13.467.189.400	0 laporan	0	2 laporan	349.568.902	1 laporan	916.364.900	1 laporan	11.405.811.842	1 laporan	12.671.745.644	4 laporan	12.575.251.644	94,09%	31,126	BAPENDASU
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																				100,00%		83,37%		
Predikat Kinerja																				Tinggi		Tinggi		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					1.277.024.188.281,00	100%	94.047.746.816,00		426.614.254.577	1.082	89.457.492.028		88.773.094.705		75.935.195.615		149.951.928.950	59,05%	402.077.470.367	94,25	496.125.217.183	94,25%		
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s/d PROGRAM IV)																				94,25		94,25%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s/d PROGRAM IV)																				Tinggi		Tinggi		

Adapun penjelasan target, capaian kinerja dan realisasi anggaran program/kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp 908.651.800,- terealisasi sebesar Rp. 796.388.796,- (87,65 %).
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 13.780.000 terealisasi sebesar Rp. 9.747.000,- (70,73 %).
- Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp 601.026.000,- terealisasi sebesar Rp 581.590.130,- (96,77 %).

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara dengan anggaran sebesar Rp 218.187.202.188,- terealisasi sebesar Rp 215.009.675.430,- (98,54%).
- Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp. 3.439.690.536,- terealisasi sebesar Rp 2.681.880.867,- (77,97%).
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp 506.820.950,- s terealisasi sebesar Rp. 461.278.512,- (91,01%).
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp 256.332.000,- terealisasi sebesar Rp. 253.965.254,- (99,08%).
- 'Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran Rp 2.431.751.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.325.836.750,- (95,64%).

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pemandahan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp. 71.000.000 terealisasi sebesar Rp 69.789.300,- (98,29 %).
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran Rp. 230.373.620,- terealisasi sebesar Rp. 22.000.000,- (9,55 %).

d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah dengan anggaran Rp. 41.140.250,- terealisasi sebesar Rp 2.960.000,- (7,19 %).

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp. 8.412.715.618,- terealisasi sebesar Rp 8.160.883.129,- (97,01 %).
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp.18.565.309.076,- terealisasi sebesar Rp. 16.492.859.780,- (88,84%).
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp. 12.000.000,- terealisasi sebesar Rp 12.000.000 (100 %).
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp 5.004.210.840,- terealisasi sebesar Rp 4.478.289.275,- (89,49 %).
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran Rp 36.640.174.524,- terealisasi sebesar Rp 30.159.140.439,- (82,31%).
- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dengan anggaran Rp 780.147.854,- terealisasi sebesar Rp 728.881.364,- (93,42%).

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp. 8.836.600.000 terealisasi sebesar Rp 6.950.194.970 (78,65 %).
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 54.113.031.935,- terealisasi Rp. 49.927.375.591,- (92,26 %).

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp 2.489.616.570,- terealisasi sebesar Rp.2.379.903.467,- (95,59%).
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.899.712.083 sebesar Rp. 4.556.755.416,- (93,00 %).
- Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 2.344.680.875 sebesar Rp. 2.288.394.875,- (97,60 %).
- Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 12.295.341.372 sebesar Rp. 10.705.518.647,- (87,07 %).
- Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 827.359.100 sebesar Rp. 410.206.034,- (49,58 %).

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten / kota dengan anggaran sebesar Rp. 34.096.000,- dan tidak terealisasi atau (0%).

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Perencanaan pengelolaan pajak daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.417.672.606,- terealisasi sebesar Rp 1.116.907.436,- (78,78 %).
- Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah dengan anggaran sebesar Rp 776.439.980,- terealisasi sebesar Rp. 503.279.244,- (64,82 %).
- Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dengan anggaran sebesar Rp 1.315.570.400,- terealisasi sebesar Rp 1.117.257.240 (84,93%).

- Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah dengan anggaran sebesar Rp. 681.350.000,- terealisasi sebesar Rp. 552.367.771 (81,07%).
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp 692.940.000,- sebesar Rp 668.876.714,- (96,53 %).
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 13.467.189.400,- terealisasi sebesar Rp. 12.671.745.644 (94,09 %).

Bapenda Provinsi Sumatera Utara telah menyusun strategi baru dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Tahun 2026. Tahun 2026 merupakan tahap awal Implementasi dan Sosialisasi Peluncuran Program pemberian reward dan apresiasi tahunan kepada wajib pajak, dengan harapan Program Reward dapat memberikan sebagai stimulus baru untuk mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran. Melalui pemberian apresiasi dalam bentuk undian berhadiah, pemerintah berupaya menciptakan motivasi positif yang tidak hanya memberikan pengalaman baru bagi wajib pajak, tetapi juga memperkuat kesadaran bahwa kepatuhan adalah bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah. Program ini diharapkan menjadi pemicu peningkatan partisipasi masyarakat, sehingga penerimaan pajak daerah dapat lebih optimal dan pelayanan publik dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan realisasi capaian kinerja pada Tahun 2024 maka dapat diarahkan langkah korektif yang menjadi kebijakan dalam perencanaan tahun berikutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas koordinasi, sinergitas dan kerjasama Pemprovsumut dengan APH serta stakeholder terkait dalam optimalisasi pendapatan daerah;
2. Meningkatkan intensitas sosialisasi layanan kemudahan seperti e-Samsat Sumut Bermartabat dalam membayar pajak di setiap daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara;
3. Meningkatkan program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka optimalisasi PAD, salah satunya dengan program reward dan Apresiasi Tahunan (insentif berupa hadiah menarik bagi wajib pajak tepat waktu).
4. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana layanan

perpajakan di Samsat yang terstandarisasi sesuai kebutuhan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tinjauan evaluasi atas kinerja pelayanan Bapenda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 dilakukan dengan mengukur capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Atas dasar urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3. (Tabel T.C. 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda
Provinsi Sumatera Utara

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH (IKU PD)/INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)																					
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA																					
No	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ JURISAN/INDIKATOR KINERJA PEMANGKUAN	SATUAN	2018	KONDISI AWAL				TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD & REALISASI						PERSENTASE CAPAIAN KINERJA						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024							
			BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI						
A. Sebelum Perubahan																					
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	48,25%	49,00%	50,38%	51,00%	53,00%	-	55,00%	-	57,00%	56,82%	60,98%	61,52%	101,55%	-	-	-	99,68%	100,89%	Bapenda Provsu dan PD terkait lainnya
2	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik nama Kendaraan Bermotor dari Tahun Sebelumnya	Persen	10,01%	10,23%	8,19%	8,39%	8,89%	9,15%	9,75%	9,65%	11,66%	-1,47%	11,73%	10,44%	102,20%	102,44%	102,92%	98,97%	-12,61%	89,00%	Bapenda Provsu
3	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari Tahun Sebelumnya	Persen	1,20%	0,01%	1,20%	1,10%	1,20%	1,24%	1,20%	1,29%	1,20%	12,64%	10,31%	7,44%	0,83%	91,67%	103,33%	107,50%	1053,33%	72,16%	Bapenda Provsu
4	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan dari Tahun Sebelumnya	Persen	-92,58%	-134,89%	2,00%	2,19%	2,00%	1,23%	2,00%	2,26%	2,00%	-27,80%	2,00%	4,04%	145,70%	109,50%	61,50%	113,00%	-1390,00%	202,00%	Bapenda Provsu
5	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Rokok dari Tahun Sebelumnya	Persen	10,80%	8,45%	10,80%	12,22%	10,80%	10,30%	10,80%	10,80%	10,80%	-2,14%	15,82%	-48,04%	78,24%	113,15%	95,37%	100,00%	-19,81%	303,67%	Bapenda Provsu
6	Persentase Kenaikan Penerimaan Retribusi Daerah dari Tahun Sebelumnya	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6,70%	N/A	N/A	1,29%	5,48%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	424,81%	Bapenda Provsu dan PD terkait lainnya
7	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BB	N/A	N/A	A-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bapenda Provsu

Pada Tahun 2024, kinerja pelayanan Bapenda Provinsi Sumatera Utara telah memenuhi target yang ditetapkan. Pada indikator Proporsi Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik telah memenuhi target yang mana realisasinya 61,52% dari target yang ditetapkan sebesar 60,98%. Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik nama Kendaraan Bermotor dari Tahun

Sebelumnya adalah sebesar 10,44%, dengan target sebesar 11,73%. Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari Tahun Sebelumnya terealisasi sebesar 7,44% dari target sebesar 10,31%. Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Rokok dari Tahun Sebelumnya dengan target sebesar 48,04% dari target sebesar 15,82%. Persentase Kenaikan Penerimaan Retribusi Daerah dari Tahun Sebelumnya dengan realisasi sebesar 5,48% dari target sebesar 1,29%.

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Bapenda Provinsi Sumatera Utara merupakan Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan, konsentrasi tugas pada pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bapenda Sumatera Utara sebagai instansi pemungut PAD, berpartisipasi langsung terhadap proses pengelolaan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah melalui proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk mendukung proses pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Dalam perkembangannya, kebutuhan fungsi pelayanan kepada masyarakat serta penyelenggaraan pembangunan selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut mengharuskan Bapenda Provinsi Sumatera Utara untuk selalu melakukan pengembangan terhadap Kebijakan Keuangan Daerah, yang diarahkan untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah. Sektor Pajak Daerah tetap menjadi kunci penting dalam penerimaan Pendapatan Daerah sehingga Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang didalamnya terdapat intensifikasi pemungutan 5 (lima) sektor Pajak Daerah yang merupakan kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Potensi yang memungkinkan untuk dilakukan peningkatan penerimaan Pajak daerah adalah dari penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), akan tetapi masih perlu klarifikasi perhitungannya dengan *vendor*, selain itu pendapatan dari Pajak Rokok Daerah perlu untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan serta Peningkatan Retribusi daerah yang dilaksanakan melalui forum Retribusi Daerah. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan melalui optimalisasi Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD), serta kemungkinan keikutsertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan (*shareholders*) beberapa BUMN yang beroperasi di Sumatera Utara.

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan PAD, terdapat permasalahan yang dihadapi, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari hasil catatan dan evaluasi pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dapat disampaikan permasalahan/hambatan kinerja yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak akan tertib administrasi terhadap kepemilikan kendaraan masih kurang;
2. Pemanfaatan layanan kemudahan seperti e-Samsat Sumut Bermartabat dalam membayar pajak belum merata di setiap daerah;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana layanan perpajakan di Samsat belum seluruhnya terstandarisasi sesuai kebutuhan;
4. Dalam proses intensifikasi pajak banyak ditemukan data kepemilikan kendaraan bermotor tidak valid;
5. Anggaran dan realisasi belanja program, kegiatan dan subkegiatan dalam SIPD RI tidak tersajikan dalam satu laporan keuangan dan masih bersifat parsial;
6. Belum optimalnya penerimaan pendapatan dan retribusi daerah sesuai dengan target yang ditetapkan, serta belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antarinstansi pemungut pajak dan retribusi daerah;

Permasalahan-permasalahan yang muncul pada pelaksanaan program kegiatan menjadi tantangan yang harus diselesaikan guna pencapaian penyelenggaraan pelayanan di bidang pendapatan daerah yang optimal.

Adapun faktor **pendorong** keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi, sinergitas dan kerjasama Pemprovsumu dengan APH serta stakeholder terkait dalam optimalisasi pendapatan daerah sudah terbangun dengan baik.
2. Komitmen pimpinan yang tinggi dalam rangka akselerasi optimalisasi

- pendapatan daerah.
3. Kerja keras seluruh jajaran ASN Bapenda Provsu dandalam rangka memberhasilkan program intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan daerah.
 4. Adanya sistem aplikasi berbasis IT dalam rangka memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
 5. Anggaran dan realisasi belanja terinci berdasarkan nomenklatur Badan/UPTD;
 6. Seluruh jajaran Bapenda Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya intensifikasi dan ektensifikasi dalam rangka akselerasi pencapaian target pendapatan.

Faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (*opportunities*) maupun ancaman (*threats*) dalam organisasi. Beberapa **peluang** yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, antara lain :

1. Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dari masyarakat;
2. Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan publik yang makin meningkat;
3. Masih tetap terbukanya pemanfaatan potensi-potensi pendapatan untuk diintensifikasi maupun ekstensifikasi, baik melalui instrument tarif maupun pengembangan potensi baru.

Sedangkan **tantangan** yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, adalah:

1. Masih terdapatnya sebagian masyarakat yang kurang mentaati ketentuan pembayaran perpajakan daerah secara tepat waktu dan tepat prosedur;
2. Masih belum stabilnya kondisi perekonomian nasional dan internasional yang berpotensi berdampak terhadap industri otomotif sebagai penopang utama perpajakan daerah provinsi;
3. Akuntabilitas belanja pemerintah yang kurang terkelola baik dan konsisten, dapat mendorong penurunan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara tepat waktu dan tepat prosedur;
4. Munculnya berbagai kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang makin kompetitif dari beberapa provinsi lainnya, yang dapat menekan ketercapaian target pendapatan sesuai asumsi yang direncanakan.

Berbagai permasalahan secara internal dan eksternal yang berada dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, pada akhirnya turut menentukan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat dalam pembentukan Badan Pendapatan Daerah.

2.3.2. Formulasi Isu - isu Penting

Beberapa isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu :

1. Optimalisasi Pendapatan Daerah dan pembangunan sistem layanan yang memudahkan pembayaran pajak berbasis teknologi dan mengoptimalkan peran e-samsat;
2. Penyelesaian sengketa dan penagihan tunggakan pajak air permukaan dan pajak lainnya;
3. Pengadaan bus samsat keliling dan kendaraan samsat masuk kampung untuk menggantikan kendaraan yang sudah tidak laik pakai;
4. Pembuatan gerai samsat di lokasi – lokasi strategis;
5. Pengembangan/penyempurnaan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui ATM (e-samsat dan go samsat sumut);
6. Sosialisasi pembayaran/pendataan pajak kendaraan bermotor/surat peringatan pajak kendaraan bermotor kerjasama dengan Pemko/Pemkab setempat;
7. Kajian Potensi PKB/BBNKB Provinsi Sumatera Utara untuk pemutakhiran data pajak;
8. Sinkronisasi Database Kendaraan Bermotor;
9. Update data potensi wajib pajak air permukaan;
10. Rekonsiliasi data potensi PBBKB dan BBNKB;

Untuk dapat memenuhi target Pendapatan Asli Daerah, maka berikut adalah arah Kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli daerah oleh BAPENDA Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

1. Melaksanakan harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang pemungutan pajak daerah;
2. Menerapkan target pendapatan daerah secara terencana, dengan mempertimbangkan kebijakan anggaran Pemerintah, dinamika kondisi perekonomian nasional/regional, serta potensi riil berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian masyarakat;

3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki khususnya personil untuk melakukan penagihan pajak secara *door to door* dan pemanfaatan jaringan teknologi informasi untuk melaksanakan administrasi perpajakan/retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengembangkan model kerjasama pelayanan pembayaran pajak dengan pihak swasta/BUMN, melalui pemanfaatan lokasi, sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
5. Memperluas sumber-sumber penerimaan daerah (*ekstensifikasi*), sesuai dengan kewenangan yang diatur dan Undang-Undang;
6. Memperdalam fasilitasi kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pajak Daerah, berbagai upaya yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026, antara lain sebagai berikut :

1. Membangun Citra Positif Bapenda Sumut Sebagai Instansi Modern, Transparan, Dan Melayani;
2. Bapenda Provinsi Sumatera Utara berupaya menghadirkan kampanye terpadu sepanjang tahun 2026 untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dan memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang taat, berupa program *reward* dan apresiasi tahunan;
3. Mengoptimalkan Layanan Digital E-samsat Dan Sistem Pembayaran Non-tunai;
4. Melakukan kerjasama dengan pihak perbankan untuk pengembangan moda pembayaran PKB secara elektronik melalui transaksi mesin *Electronic Data Capture* (EDC), maupun kerjasama penyelenggaraan pelayanan dengan memafaatkan aset yang dimiliki oleh mitra Payment Point Online Bank (PPOB);
5. Mengembangkan kerjasama penyelenggaraan pembayaran PKB melalui media marketplace/eMoney seperti: Shopee, Ovo, Linkaja, Dana dsb.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan target kinerja beserta rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Bapenda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 berpedoman kepada kerangka perencanaan strategis dalam dokumen Rencana Strategis Bapenda Tahun 2025-2029. Pada dokumen Renstra Bapenda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, data yang digunakan adalah data perencanaan tahun kedua Renstra Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Ekstraksi data rencana kegiatan, pagu indikatif maupun target kinerja tahun 2026 pada dokumen tersebut merupakan asumsi awal perencanaan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja utama Perangkat Daerah.

Review terhadap RKPD dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, proses perbandingan antara dengan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui sesuai /tidak sesuai, cocok/ketidakcocokan besarnya (anggaran/volume/satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

Tabel 2.4. (Tabel T-C. 31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Provinsi Sumatera Utara

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Badan Pendapatan Daerah				344.050.742.399	Badan Pendapatan Daerah				344.050.742.399	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				309.832.150.912	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				309.832.150.912	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				864.166.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				864.166.600	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provsu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dok	864.166.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provsu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dok	864.166.600	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				189.910.544.090	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				189.910.544.090	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provsu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.535 Orang	186.859.503.290	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provsu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.535 Orang	186.859.503.290	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provsu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	296.269.600	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provsu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	296.269.600	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provsu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	2.166.964.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provsu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	2.166.964.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provsu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Dok	587.806.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provsu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Dok	587.806.400	

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				964.135.750	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			964.135.750
Pemindahan Tugas ASN	Provsu	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	100 Orang	-	Pemindahan Tugas ASN	Provsu	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	100 Orang
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provsu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	592.477.600	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provsu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provsu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 orang	371.658.150	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provsu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah				40.673.237.570	Administrasi Umum Perangkat Daerah			40.673.237.570
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provsu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.104.606.078	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provsu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provsu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	23.749.683.367	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provsu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provsu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	7.816.219.391	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provsu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provsu	Jumlah Dokumen B Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Bacaan	12 Dok	5.050.993.233	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provsu	Jumlah Dokumen B Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Bacaan	12 Dok

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Provsu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	14.132.700	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Provsu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	14.132.700
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provsu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.937.602.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provsu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.937.602.800
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provsu	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional lapangan yang Disediakan	12 Laporan	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provsu	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional lapangan yang Disediakan	12 Laporan	-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provsu	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Laporan	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provsu	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Laporan	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				66.577.359.033	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				66.577.359.033
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provsu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	7.419.906.423	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provsu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	7.419.906.423

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provsu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	59.157.452.610	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provsu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	59.157.452.610
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.842.707.869	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.842.707.869
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provsu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	37 Unit /kali	3.881.616.452	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provsu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	37 Unit /kali	3.881.616.452
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provsu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	1.712.567.790	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provsu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	1.712.567.790
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provsu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	5.248.523.627	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provsu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	5.248.523.627
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah		34.218.591.487	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah		34.218.591.487
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah Laporan pengelolaan pendapatan daerah		34.218.591.487	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah Laporan pengelolaan pendapatan daerah		34.218.591.487
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Provsu	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Dok	1.592.245.558	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Provsu	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Dok	1.592.245.558

Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Provsu	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	12 Dok	28.897.858.710	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Provsu	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	12 Dok	28.897.858.710
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Provsu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	-	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Provsu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	-
Pelayanan dan Konsultasi Pajak	Provsu	Jumlah Laporan Permasalahan yang telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	12 Laporan	1.734.779.400	Pelayanan dan Konsultasi Pajak	Provsu	Jumlah Laporan Permasalahan yang telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	12 Laporan	1.734.779.400
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Provsu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	1.993.707.820	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Provsu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	1.993.707.820
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Provsu	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	-	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Provsu	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	-

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penjaringan aspirasi masyarakat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang, tetapi tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2026 yang tertuang di dalam RPJMD 2025-2029. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang untuk tahun 2026 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut:

Tabel 2.5 (T-C. 32.)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Sumatera Utara

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra K/L, RPJMD (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan RKP serta acuan Badan Usaha/Non State Actors.

Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya RPJMN 2025-2045 mengusung beberapa misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2045. Prioritas Nasional merupakan goals periode jangka menengah tahun 2025-2029. Misi Presiden yang disebut sebagai Asta Cita dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. PRIORITAS I** : Memperkokoh Idiologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- 2. PRIORITAS II** : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syari'ah Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
- 3. PRIORITAS III** : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

4. **PRIORITAS IV** : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.
5. **PRIORITAS V** : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. **PRIORITAS VI** : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. **PRIORITAS VII** : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, narkoba, Judi dan Penyeludupan.
8. **PRIORITAS VIII** : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Selanjutnya RPJMN 2025-2029 juga memuat 17 Program Prioritas Presiden, yaitu :

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air;
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara;
3. Reformasi hukum, politik dan birokrasi;
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Pemberantasan Kemiskinan;
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;

14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olah raga.

Berdasarkan Misi/Program Prioritas, Sasaran Utama Pembangunan Nasional dan Proyek Prioritas dalam RPJMN 2025-2029 diatas dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu mengelola pendapatan daerah, termasuk pajak dan retribusi, yang merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan. Peningkatan pendapatan daerah yang dikelola Bapenda secara langsung berkontribusi pada ketersediaan anggaran untuk berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik, dengan demikian Bapenda Provinsi Sumatera Utara mendukung kebijakan nasional 2025-2029 melalui dukungan terhadap misi/prioritas nasional ke-7 memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional.

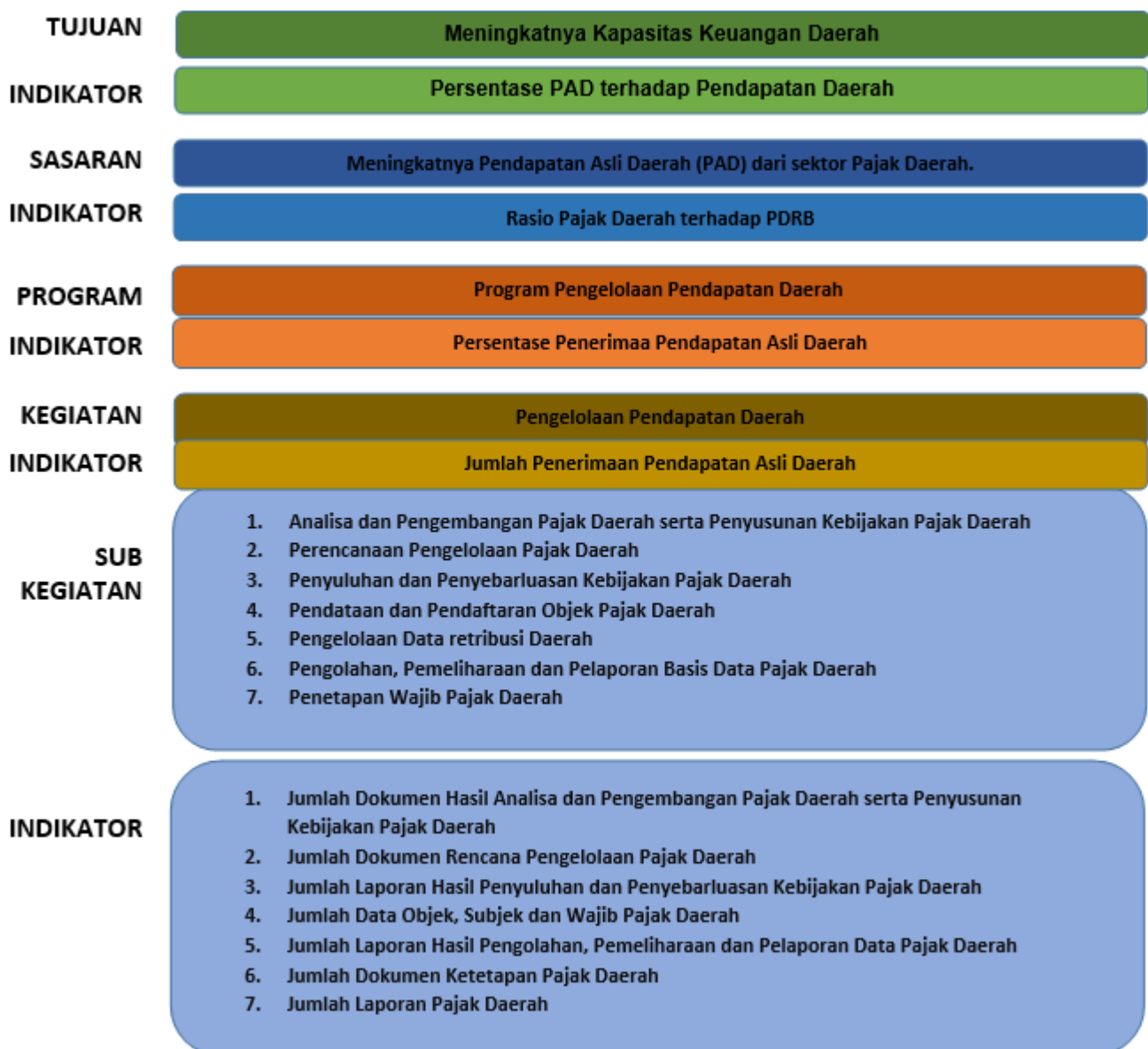
Bentuk tindak lanjut yang dilaksanakan Bapenda Provinsi Sumatera Utara dalam menindaklanjuti arah kebijakan tersebut adalah dengan upaya-upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah diantaranya :

1. Menyesuaikan besaran dan pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan stimulus/insentif Pajak Daerah untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak;
3. Meningkatkan sarana, prasarana, serta memperluas dan mengembangkan kerjasama dengan mitra dalam rangka penyelenggaraan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang semakin mudah bagi Masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Bapenda Provinsi Sumatera Utara didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan sasaran target kinerja Renstra Bapenda Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 yaitu **"Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah"** yang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.1 Cascading Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara



3.3. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 guna mencapai tujuan dan sasaran Bapenda Provinsi Sumatera Utara yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900-1-2850 Tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Program Urusan Penunjang Pemerintah Provinsi

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang milik daerah. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan pokok dari program ini terdiri dari :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah;
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah, yang difokuskan pada upaya penyebaran informasi tentang pengelolaan pendapatan daerah dan pemanfaatan IT dalam pengelolaan pendapatan daerah, dengan kegiatan utamanya yaitu : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Table 3.2 (Tabel T-C. 33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan
Prakiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Sumatera Utara

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5,02	Badan Pendapatan Daerah				344.050.742.399				378.458.816.639
5,02,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Provsu		309.832.150.912				341.245.880.801
5,02,01,1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Provsu		864.166.600				589.019.628
5,02,01,1,01,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provsu	12 Dok	864.166.600	APBD		12 Dok	589.019.628
5,02,01,1,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				189.910.544.090				199.982.613.814
5,02,01,1,02,01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provsu	2.535 Orang	186.859.503.290	APBD		2.535 Orang	196.202.478.454
5,02,01,1,02,02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provsu	12 Dok	296.269.600	APBD		12 Dok	740.674.000
5,02,01,1,02,03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provsu	12 Dok	2.166.964.800	APBD		12 Dok	2.275.313.040

5,02,01,1,02,05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provsu	12 Dok	587.806.400	APBD		12 Dok	764.148.320
5,02,01,1,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				964.135.750				1.119.797.085
5,02,01,1,05,08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Provsu	100 Orang	-	APBD		100 Orang	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provsu	-	592.477.600	APBD		-	710.973.120
5,02,01,1,05,09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provsu	60 orang	371.658.150	APBD		60 orang	408.823.965
5,02,01,1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				40.673.237.570				49.144.732.204
5,02,01,1,06, 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provsu	12 Laporan	1.104.606.078	APBD		12 Laporan	1.215.066.686
5,02,01,1,06, 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provsu	12 Laporan	23.749.683.367	APBD		12 Laporan	28.499.620.041

5,02,01,1,06, 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakaneralatan dan Perlengkapan Kantor	Provsu	12 Paket	7.816.219.391	APBD		12 Paket	9.379.463.270
5,02,01,1,06, 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen BJumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakanahan Bacaan	Provsu	12 Dok	5.050.993.233	APBD		12 Dok	6.061.191.880
5,02,01,1,06, 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Provsu	12 Dok	14.132.700	APBD		12 Dok	23.626.548
5,02,01,1,06, 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDan	Provsu	12 Laporan	2.937.602.800	APBD		12 Laporan	3.965.763.780
5,02,01,1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-				5.158.965.695
5,02,01,1,07,02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional lapangan yang Disediakan	Provsu	12 Laporan	-	APBD		12 Laporan	1.478.936.315
5,02,01,1,07,09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provsu	12 Laporan	-	APBD		12 Laporan	3.680.029.379

5,02,01,1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				66.577.359.033				69.169.281.312
5,02,01,1,08,02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provsu	12 Bulan	7.419.906.423	APBD		12 Bulan	8.532.892.387
5,02,01,1,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provsu	12 Bulan	59.157.452.610	APBD		12 Bulan	60.636.388.925
5,02,01,1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.842.707.869				16.081.471.063
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Provsu	37 Unit /kali	3.881.616.452	APBD		37 Unit /kali	5.046.101.388
5,02,01,1,09,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provsu	40 Unit	1.712.567.790	APBD		40 Unit	4.474.715.142
5,02,01,1,09,10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provsu	40 Unit	5.248.523.627	APBD		40 Unit	6.560.654.534
5,02,04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah			34.218.591.487				37.212.935.838
5,02,04,1,01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan pengelolaan pendapatan daerah			34.218.591.487				37.212.935.838

5,02,04,1,01,01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Provsu	12 Dok	1.592.245.558	APBD		12 Dok	545.373.396
5,02,04,1,01,02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	Provsu	12 Dok	28.897.858.710	APBD		12 Dok	30.342.751.645
5,02,04,1,01,03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Provsu	12 Laporan	-	APBD		12 Laporan	670.392.250
5,02,04,1,01,08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak	Jumlah Laporan Permasalahan yang telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	Provsu	12 Laporan	1.734.779.400	APBD		12 Laporan	1.889.167.500
5,02,04,1,01	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Provsu	12 Laporan	1.993.707.820	APBD		12 Laporan	2.093.393.211
5,02,04,1,01,12	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Provsu	12 Laporan	-	APBD		12 Laporan	1.671.857.835

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara ini direncanakan untuk pencapaian visi misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam PRPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025 – 2029 dalam urusan pendapatan daerah sebagaimana indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Pada rencana kerja Bapenda Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 ini diusulkan 2 (dua) program. Pemilihan program dan kegiatan tersebut juga memperhatikan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 yang mana Bapenda Provinsi Sumatera Utara mendukung tujuan lima yaitu Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas, dengan sasaran sembilan yaitu Meningkatkan kapasitas keuangan daerah.

Program dan kegiatan Bapenda Provinsi Sumatera Utara diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (*public service function*), dan melaksanakan pembangunan (*development function*).

Rencana Kerja Bapenda Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 ini disusun berdasarkan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 dengan pagu indikatif Rp. 344.050.742.399,- dengan pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran serta isu-isu strategis yang selanjutnya dituangkan dalam Renja tahun 2026. Adapun sasaran prioritas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Intensifikasi melalui pendataan ulang dan razia terhadap potensi pajak daerah (kendaraan bermotor–termasuk alat-alat berat/besar dan pajak APU);
2. Pengoperasian Layanan Pembayaran PKB dengan e-SAMSAT SUMUT;
3. Pendekatan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui pendefinitifan UPT/Samsat pada setiap kabupaten/kota dan pengoperasian gerai samsat, samsat keliling serta perbaikan sarana dan prasarana;

4. Peningkatan Kualitas SDM (*In-house Training* dan Juru Sita Pajak);
5. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
6. Integrasi dan Sentralisasi Database Kendaraan Bermotor antara Polri-Badan Pendapatan Daerah dan Jasa Raharja;
7. Penyempurnaan Struktur Organisasi UPT BAPENDASU;
8. Kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Bidang Kesamsatan dan Pendapatan Daerah;
9. Sensus / Penelusuran Kendaraan Bermotor Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KB-TMDU);
10. Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP);
11. Penyempurnaan/Revisi Regulasi tentang Pemungutan Pendapatan Daerah.

Dalam Rencana Kerja Bapenda Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 ini jika terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD baik nomenklatur kegiatan maupun pagu indikatif kegiatan yang semata-mata dikarenakan perubahan prioritas dan menyesuaikan isu yang berkembang pada Pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel di bidang pendapatan.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Provsu Tahun 2026 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	1	2	3	4	5	6	7
5,02	Badan Pendapatan Daerah				344.050.742.399		
5,02,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Provsu		315.935.505.549		
5,02,01,1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Provsu		649.252.000		
5,02,01,1,01,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provsu	12 Dok	649.252.000	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi SKPD	Provsu	12 Laporan	-	APBD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provsu	12 Laporan	-	APBD	
5,02,01,1,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				201.977.022.391		
5,02,01,1,02,01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provsu	2.535 Orang	197.851.145.916	APBD	
5,02,01,1,02,02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provsu	12 Dok	821.714.475	APBD	
5,02,01,1,02,03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provsu	12 Dok	2.626.786.000	APBD	

5,02,01,1,02,05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provsu	12 Dok	677.376.000	APBD	
5,02,01,1,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				661.191.000		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Provsu	-	-	APBD	
5,02,01,1,05,08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Provsu	100 Orang	-	APBD	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provsu	-	120.880.000	APBD	
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Provsu	-		APBD	
5,02,01,1,05,09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provsu	60 orang	540.311.000	APBD	
5,02,01,1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				32.020.618.645		
5,02,01,1,06, 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provsu	12 Laporan	539.686.352	APBD	
5,02,01,1,06, 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provsu	12 Laporan	18.230.520.227	APBD	

5,02,01,1,06, 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakaneralatan dan Perlengkapan Kantor	Provsu	12 Paket	4.236.861.354	APBD	
5,02,01,1,06, 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen BJumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakanahan Bacaan	Provsu	12 Dok	5.233.420.032	APBD	
5,02,01,1,06, 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Provsu	12 Dok	21.478.680	APBD	
5,02,01,1,06, 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDan	Provsu	12 Laporan	3.758.652.000	APBD	
5,02,01,1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.902.985.000		
5,02,01,1,07,02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional lapangan yang Disediakan	Provsu	12 Laporan	-	APBD	
	Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provsu	-		APBD	
5,02,01,1,07,09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provsu	12 Laporan	3.902.985.000	APBD	
5,02,01,1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				63.578.247.611		
5,02,01,1,08,02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provsu	12 Bulan	9.384.731.699	APBD	

5,02,01,1,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provsu	12 Bulan	54.193.515.912	APBD	
5,02,01,1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				13.146.188.902		
5,02,01,1,09,02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provsu	40 Unit /kali	-	APBD	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Provsu	37 Unit /kali	6.145.507.934	APBD	
5,02,01,1,09,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provsu	40 Unit	3.838.522.856	APBD	
5,02,01,1,09,10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provsu	40 Unit	3.162.158.112	APBD	
5,02,04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah			28.115.236.850		
5,02,04,1,01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan pengelolaan pendapatan daerah			28.115.236.850		
5,02,04,1,01,01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Provsu	6 Dokumen	345.000.000	APBD	

5,02,04,1,01,02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	Provsu	12 laporan	871.216.000	APBD	
5,02,04,1,01,03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Provsu	3 Laporan	-	APBD	
5,02,04,1,01,08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak	Jumlah Laporan Permasalahan yang telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	Provsu	12 laporan	23.734.779.400	APBD	
5,02,04,1,01	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Provsu	5 Laporan	3.164.241.450	APBD	
5,02,04,1,01,12	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Provsu	12 laporan	-	APBD	

BAB V P E N U T U P

5.1. Catatan Penting

Program Pengendalian Pendapatan Daerah dengan Kegiatan Pengeolaan Pendapatan Daerah, Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah yang merupakan salah satu Program yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu strategi dalam mempercepat tercapainya target Pendapatan Asli Daerah sehingga anggaran untuk sub kegiatan tersebut perlu ditambah.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

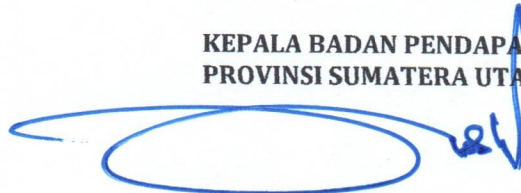
Program Pengendalian Pendapatan Daerah berorientasi pada strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, antara lain :

- Pengadaan Samsat Malam
- Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor
- Pelaksanaan Car Free Day

Strategi tersebut dalam praktek pelaksanaannya didasarkan terhadap hasil Evaluasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada triwulan berjalan. Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 memuat nama-nama program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami perubahan baik penambahan kegiatan, pengurangan kegiatan, menambah/mengurangi pagu anggaran ataupun mengganti nama kegiatan dari sebelum dan sesudah adanya perubahan rencana kerja. Adanya perubahan pagu anggaran ini disebabkan adanya efisiensi anggaran baik di pusat maupun di Provinsi Sumatera Utara yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan perkembangan aktual yang memungkinkan terjadinya perubahan tersebut.

Medan, 10 Oktober 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA



Ir. ARDAN NOOR, MM,
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660926 199303 1 010